

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan yang melibatkan korporasi dan Kantor Akuntan Publik (KAP) selama beberapa dekade terus bergulir. Skandal terbaru yang menjerat Garuda Indonesia dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia akan buruknya pengendalian mutu korporasi dan menggarisbawahi peran auditor yang sangat krusial terhadap skandal ini. Dikutip dari CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto memaparkan keterlibatan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan atas kelalaian dalam mengaudit Laporan Keuangan Garuda Indonesia, diantaranya: Pertama, Akuntan Publik (AP) bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain karena AP sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Hal ini melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560.

Keterlibatan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan memunculkan berbagai konsekuensi yang dijatuhkan pada kedua belah pihak, baik Garuda Indonesia maupun Kantor Akuntan Publik. Siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) menyebutkan beberapa sanksi yang diterima terkait kasus Laporan Keuangan Tahunan PT. Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, yaitu sanksi administratif berupa denda yang dijatuhkan pada seluruh anggota direksi Garuda Indonesia sebesar masing-masing seratus juta rupiah dan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada AP terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perintah tertulis

Kepada KAP Tanubrata untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK.

Terjadinya berbagai kasus kecurangan yang melibatkan auditor baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pertanyaan bagi publik akan kredibilitas auditor (Ardelean, 2013). Reputasi auditor sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, karena auditor merupakan profesi yang berlandaskan kepercayaan dan berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan publik. Auditor tidak hanya berfokus pada akurasi dan relevansi laporan keuangan, namun juga dampaknya terhadap pihak ketiga. Konsekuensi akan keterlibatan auditor berimbas pada berkurangnya kepercayaan publik pada kinerja auditor (Ardelean, 2013). Keterlibatan auditor dalam berbagai kasus manipulasi keuangan disebabkan lemahnya pertimbangan etis auditor yang berimbas pada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis dalam profesi. Pertimbangan etis berperan sebagai salah satu komponen fundamental yang mempengaruhi objektivitas dan integritas auditor dalam memberikan opini audit. Dalam menghadapi dilema etis, auditor diharapkan membuat penilaian etis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kode etik profesi yang berlaku. Publik mengandalkan kredibilitas laporan audit untuk pengambilan keputusan. Laporan ini sangat bergantung pada tingkat integritas dan akuntabilitas auditor ketika berurusan dengan pertimbangan etis.

Sparks dan Pan (2009) mendeskripsikan pertimbangan etis sebagai penilaian personal individu terhadap etis atau tidak etisnya suatu perilaku. Pertimbangan etis mengacu pada sejauh mana perilaku tertentu dianggap etis oleh seorang individu (Reidenbach & Robin, 1990). Hunt dan Vitell (1986) mendefinisikan pertimbangan etis sebagai tahap dimana seseorang menyadari isu-isu etis dan mempertimbangkan solusi-solusi untuk menyelesaikan isu tersebut untuk mendapatkan penyelesaian yang paling menguntungkan. Dalam konteks profesi auditor, perilaku etis dan profesionalitas sangat krusial karena opini yang diberikan auditor tidak hanya dipengaruhi kemampuan teknis melainkan juga pertimbangan etis. Standar etika dalam audit menjadi dasar bagaimana auditor merespons dilema etis yang dihadapi. Perilaku tidak etis yang dilakukan auditor

menghasilkan beberapa konsekuensi, seperti diterbitkannya *Sarbanes Oxley Act* pada tahun 2002 yang mengenalkan beberapa reformasi dalam audit, seperti rotasi partner audit dan larangan memberikan pelayanan non-audit. Organisasi profesional akuntansi, *International Federation of Accountants* (IFAC) menerbitkan *International Education Standards 4* (IES 4) pada tahun 2003 yang merupakan salah satu dari serangkaian tindakan untuk mengembalikan reputasi dan kredibilitas auditor setelah keterlibatan auditor atas berbagai skandal korporasi yang terjadi (Titard *et al.*, 2004).

Jones (1991) berpendapat bahwa dalam memahami pertimbangan etis seseorang, perlu menginvestigasi karakteristik dari permasalahan moral sekaligus faktor personal dan situasional. Eksplanasi atas pertimbangan etis yang berdampak pada etis atau tidak etisnya sebuah tindakan merujuk pada kerangka teori yang dikembangkan oleh psikolog sosial – *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan salah satu teori yang umum digunakan dalam dunia psikologi yang efektif memprediksi dan menjelaskan perilaku seorang individu (Cooke & French, 2008). *Theory of Planned Behavior* mengindikasikan bahwa perilaku didasari oleh intensi. Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi *behaviorial intention* seseorang; *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Teori ini memprediksi bahwa semakin baik individu mengevaluasi perilaku tertentu, semakin besar kemungkinan dia akan melakukan perilaku itu (Fishbein dan Ajzen, 1975). Dalam studi empiris yang dilakukan Carpenter dan Reimers (2005) mengemukakan hasil bahwa *attitude* merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi *behaviorial intention* seseorang. Seseorang dengan *attitude* yang baik, cenderung memiliki pertimbangan etis yang kuat.

Proses pertimbangan etis hanya terjadi jika berhadapan dengan permasalahan etika (Sparks & Hunt, 1998) dan seringkali dinilai dalam konteks situasionalnya. Sensitivitas terhadap masalah etika bervariasi pada setiap individu. Jika tidak ada masalah etika yang dirasakan, proses untuk membuat penilaian etis tidak terjadi. Dilema etis merupakan faktor penting yang akan memicu proses penilaian etis. Persepsi auditor tentang dilema etika akan mempengaruhi pertimbangan etis mereka. Ross dan Robertson (2003) menegaskan bahwa faktor

situasional berkontribusi untuk memahami pembuatan keputusan etis, khususnya kesediaan untuk terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Variabel yang mendapatkan perhatian adalah ideologi etika yaitu relativisme dan idealisme (O'Fallon & Butterfield, 2005) serta religiusitas.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Ideologi etika mengacu pada sistem etika yang digunakan untuk membuat penilaian moral, yang menawarkan pedoman untuk menilai dan menyelesaikan perilaku yang mungkin dipertanyakan secara etis (Henle, Giacalone, & Jurkiewicz, 2005). Individu yang memiliki ideologi etika berbeda akan memiliki sensitivitas yang berbeda dalam merespons tindakan yang tidak etis dan mempengaruhi cara memproses informasi tentang permasalahan etis (D. Forsyth, 1985). Ideologi etika akan mempengaruhi penilaian dan kepercayaan individu dalam mempertimbangkan konsekuensi dari situasi tertentu dan juga memberikan kriteria bagi individu untuk memilih tindakan tertentu. Individu yang memiliki perbedaan dalam orientasi etis idealisme dan relativisme memiliki sudut pandang berbeda dalam permasalahan etis, dan seringkali mencapai konklusi yang berbeda tentang moralitas suatu tindakan (Barnett, Bass, & Brown, 1994).

Dimensi idealisme mengacu pada sejauh mana seorang individu berfokus pada kebenaran atau kesalahan dari suatu tindakan terlepas konsekuensi dari tindakan itu (Rawwas, Vitell, & Al-Khatib, 1994; Swaidan, Vitell, & Rawwas, 2003). Seorang idealis percaya bahwa nilai moral menuntun suatu tindakan, sebagai contoh, jika suatu tindakan merugikan orang lain maka sebaiknya tidak dilakukan, karena hal tersebut salah menurut nilai moral universal (D. R. Forsyth, 1992). Dengan kata lain idealisme merupakan karakteristik orientasi etis yang mengacu pada kepedulian seseorang terhadap kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Paham idealis percaya bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan melakukan tindakan etis akan cenderung menilai permasalahan tidak etis dengan lebih ketat (D. Forsyth, 1980).

Relativisme secara kontras menunjukkan bahwa aturan moral bukan merupakan bagian dari prinsip moral universal, namun relatif terhadap konteks budaya (D. R. Forsyth, 1992; Swaidan *et al.*, 2003) dan berfokus pada

konsekuensi dari tindakan. Seorang relativis skeptis dan menolak prinsip moral universal saat membedakan antara benar dan salah. Relativis beranggapan tindakan moral didasari oleh elemen-elemen seperti situasi dan karakteristik individu. Relativisme menyatakan bahwa tidak ada sudut pandang suatu etika yang dapat diidentifikasi secara jelas merupakan 'yang terbaik', karena setiap individu mempunyai sudut pandang tentang etika dengan sangat beragam dan luas. Sebagai akibatnya relativis akan menimbang faktor situasional dan personal lebih dari prinsip etika yang relevan dalam membuat keputusan (D. R. Forsyth, 1992).

Dalam studi empiris Douglas, Davidson, & Schwartz (2001) menunjukkan idealisme memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertimbangan etis dibandingkan relativisme. Idealisme berkaitan dengan tingkat etika yang lebih tinggi, sedangkan relativisme berkaitan dengan tingkat etika yang lebih rendah (Rawwas *et al.*, 1994). Disisi lain, hasil penelitian yang tidak konsisten ditemukan oleh Marques dan Pereira (2009) serta Chan dan Leung (2006) bahwa orientasi filosofi idealisme atau relativisme tidak mempengaruhi pertimbangan etis akuntan profesional.

Religiusitas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan bersamaan dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip kepercayaan yang telah diatur oleh Tuhan (McDaniel & Burnett, 1990). Alhouthi *et al.* (2015) mendeskripsikan religiusitas sebagai kekuatan keyakinan akan keberadaan Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan, tindakan yang sesuai prinsip-prinsip agama. Geyer dan Baumeister (2005) menjelaskan agama memiliki ikatan yang kuat terhadap moralitas, lebih jauh lagi, agama dianggap sebagai sumber moralitas. Karenanya, seseorang yang memiliki keyakinan agama yang kuat cenderung lebih peka terhadap permasalahan etika ketika menghadapi situasi yang dipertanyakan dan merespons dengan perilaku etis. Namun, bukti empiris yang mendukung hubungan ini masih kurang lazim (Kennedy & Lawton, 1998). Selanjutnya, penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang tidak konsisten, dengan beberapa studi menemukan hubungan negatif antara religiusitas dan etika, sementara yang lain tidak menemukan hubungan, dan yang lain telah menemukan hubungan

positif (A. Walker, Smither, & DeBode, 2012). Temuan yang tidak konsisten menyebabkan Hood, Hill, & Spilka (2009) untuk menggambarkan hubungan antara religiusitas dan pertimbangan etis sebagai *rollercoaster*.

Vitell *et al.* (2005) dan Huffman (1988) secara kontras memaparkan bahwa religiusitas merupakan determinan terkuat dalam menentukan nilai-nilai pada individu serta mempengaruhi perilaku etis individu. Walker *et al.* (2012) menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan etis auditor. Auditor memiliki pertimbangan etis yang kuat apabila memulai kegiatan dengan doa dan sembahyang, yang juga akan memberikan ketenangan untuk auditor, sehingga akan mudah menilai hal-hal yang tidak etis atau etis untuk dilakukan (Yudhistira & Habiburrochman, 2017). Giacalone dan Jurkiewicz (2003) sebaliknya menemukan bahwa religiusitas secara negatif mempengaruhi persepsi individu atas perilaku menyimpang. Beberapa peneliti dan Kohlberg (1981) menyangkal hubungan religiusitas dan penalaran moral karena dua hal tersebut memiliki cara berfikir yang berbeda. Penalaran moral didasarkan pada argumen rasional dan dipengaruhi oleh perkembangan kognitif sedangkan penalaran agama didasarkan pada wahyu dari otoritas keagamaan. Karenanya, pengaruh religiusitas terhadap perilaku etis individu bersifat situasional (Woodbine & Porter, 2009) atau seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi bukan berarti selalu menjunjung tinggi nilai etika (Rashid & Ibrahim, 2008).

Penelitian yang meneliti pengaruh religiusitas terhadap pertimbangan etis dalam situasi yang melibatkan permasalahan etika masih sedikit. Hal ini menjadi kesenjangan dalam literatur terkini. Weaver dan Agle (2002) menyarankan para peneliti perlu mengukur dampak dari berbagai ekspektasi peran keagamaan untuk lebih memahami hubungan antara konstruk religiusitas dan etika bisnis. Kesenjangan literatur yang menjelaskan pengaruh ideologi etika dan religiusitas terhadap pertimbangan etis mengundang penulis untuk melakukan studi empiris terhadap hal ini.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti pengaruh ideologi etika idealisme terhadap pertimbangan etis

2. Untuk meneliti pengaruh ideologi etika relativisme terhadap pertimbangan etis
3. Untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap pertimbangan etis

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada auditor yang tersebar di kantor akuntan publik di Surabaya menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Idealisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan etis auditor. Auditor dengan orientasi etika idealisme akan menilai suatu permasalahan etika atas kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika maupun regulasi yang berlaku dan menghindari konsekuensi negatif yang dapat merugikan orang lain
2. Relativisme berpengaruh negatif terhadap pertimbangan etis. Auditor dengan kecenderungan cenderung menilai permasalahan etis dengan lebih toleran.
3. Religiusitas berpengaruh positif terhadap pertimbangan etis auditor. Semakin kuat tingkat religiusitas auditor, maka semakin baik pula pertimbangan etis auditor ketika berhadapan dengan dilema etis.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mengangkat latar belakang penelitian yang berasal dari permasalahan etika dikalangan akuntan publik baik masa kini maupun masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas konstruk ideologi etika dan religiusitas terhadap pertimbangan etis. Bab ini juga menguraikan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan *Theory of Planned Behavior* sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Pada bab ini juga mendeskripsikan masing-masing variabel secara mendalam serta pengembangan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, identifikasi tiap-tiap variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis data dan hasil penelitian. Dalam bab ini juga dijabarkan interpretasi atas hasil penelitian dari metode statistik kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, mengaitkan antara teori yang digunakan dengan hasil, serta membahas masalah yang telah dirumuskan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.